

BAB II

DESKRIPTIF *SEARCH FOR COMMON GROUND* DALAM MEMBINA PERDAMAIAN PASCA KONFLIK POSO (2009-2016)

2.1. Kronologi dan Kejahatan Kemanusiaan dalam Konflik Poso

Peristiwa kekerasan akibat konflik di Poso bersamaan dengan transisi demokrasi sejak pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 yang telah berkuasa selama 32 tahun. Fenomena ini sesuai dengan pernyataan dari perspektif Komparatif (Snyder 2000; van Klinken 2007), dimana ketika negara tengah berada pada fase demokratisasi maka akan cenderung mengalami konflik komunal (McRae, 2016, p. 2).

Poso bukan satu-satunya daerah yang mengalami kekerasan komunal pada masa transisi demokrasi 1998, terdapat empat daerah lainnya yang mengalami kekerasan komunal berbasis agama dan etnis seperti yang disebutkan pada tabel di bawah:

Tabel 2.1

Lokasi Terjadinya Konflik Kekerasan Skala Besar Selama Periode Transisi Demokrasi Indonesia Tahun 1998

Komunal		Separatis
Antar agama	Antar etnis	
Sulawesi Tengah (Poso)	Kalimantan Barat	Papua
Maluku	Kalimantan Tengah	Aceh
Maluku Utara	-	Timor Timur*

Sumber: McRae Hal. 2.

Dari tabel di atas terdapat empat daerah lain di Indonesia yang menjadi daerah konflik berlatar agama maupun etnis yaitu Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan konflik pada kisaran tahun 1998 yang terjadi akibat gerakan separatis terjadi di Papua, Aceh, dan Timor Timur. Timor Timur sendiri secara resmi telah memisahkan diri dari Indonesia sejak tahun 1999 dan kini dikenal sebagai Timor Leste (McRae, 2016).

Secara garis besar konflik Poso digolongkan ke dalam 4 fase periode tahun 1998-2007. Namun Penulis hanya meneliti konflik sepanjang tahun 1998-2001 sebagai kategori tunggal *pogrom*¹ religius yang memiliki intensitas kerusuhan dan jumlah korban paling banyak, terutama korban perempuan dan anak-anak.

Berikut adalah gambaran umum konflik Poso yang terjadi selama 4 periode selama tahun 1998-2007 (McRae, 2016):

Tabel 2.2
Fase Kekerasan Dalam Konflik Poso

(1)	(2) Waktu	(3) Lokasi	(4) Pemimpin	(5) Massa	(6) Perkiraan jumlah korban
Kerusuhan kota	Desember 1998, April 2000	Kota Poso	Jaringan patronase politik lokal	Pemuda desa sekitar dengan penduduk kota	91 orang meninggal; 8 orang terluka (7 diantaranya Polisi);
Pembunuhan yang menyebar luas	Mei-Juni 2000	Tiga front utama di sebelah selatan, tenggara, dan barat kota	Kelompok inti kombatan yang terdiri dari para lelaki yang mengalami kerugian dalam kerusuhan kota, serta keluarga dan saudara	Penduduk desa Kristen yang berkumpul di Tagolu; rekrutmen temporer dari anggota komunitas tempat	Sedikitnya 249 orang meninggal (mayoritas Muslim), dan puluhan ribu lainnya mengungsi; Penyiksaan kepada lebih dari 50 orang dan pelecehan seksual massal

¹ *Pogrom* adalah penyerangan oleh massa. (McRae, 2016) Hal. 13.

(1)	(2) Waktu	(3) Lokasi	(4) Pemimpin	(5) Massa	(6) Perkiraan jumlah korban
			mereka, serta beberapa migran Katolik.	serangan terjadi	kepada perempuan dan anak-anak di Balaidesa Ranoncu dan Balaidesa Tambaro.
Konflik berlarut-larut diantara dua kelompok	Juni 2000-Desember 2001, Agustus 2002	Banyak lokasi menyebar di Kabupaten Poso	Aliansi mujahidin dan Muslim lokal; Struktur kepemimpinan Kristen yang relatif tidak diketahui	Pemuda dari seluruh wilayah berjaga pada malam hari; rekrutmen/partisipasi temporer untuk serangan besar	Sedikitnya 100 santri meninggal dan terjadi kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak sebelum dibantai
Kekerasan sporadic	2002-Januari 2007	Banyak lokasi menyebar di Kabupaten Poso	Aliansi mujahidin dan pendukung anti lokal	Tidak ada partisipasi massa	Sekitar 150 orang meninggal

Sumber: McRae Hal. 10

Melalui tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konflik Poso 1998 bermula dari konflik ketidaksengajaan atau murni kriminalitas antar dua pemuda yang bertikai namun dikembangkan dengan isu politik yang dibalut dengan isu keagamaan sehingga menjadikan konflik Poso 1998 berlarut-larut hingga menjadi isu kekerasan komunal terbesar sepanjang sejarah di Indonesia pasca era Reformasi. Dari sebuah data yang dipublikasikan menunjukkan bahwa kerugian yang ditimbulkan dari konflik di Kabupaten Poso seperti Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, dan Tentena berjumlah \pm 1.129 korban jiwa, \pm 1.754 bangunan terbakar, dan lebih dari 93.254 warga menjadi pengungsi (Marzuki, 2007).

2.2. Deskriptif *Search for Common Ground* (SFCG)

2.2.1. SFCG sebagai *International Non-Governmental Organizations* (NGOs)

Search for Common Ground (SFCG) adalah organisasi non-profit yang bersifat sosial dari Amerika Serikat dan sebagai asosiasi non-profit di Brusel, Belgia. NGO ini selalu menerapkan cara-cara yang bersifat inovatif untuk menekan kekerasan dan menyebarkan pesan damai ke seluruh dunia termasuk di lebih dari 30 negara di Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika. Hingga tahun 2016, SFCG memiliki 56 kantor cabang di seluruh dunia, 1.477 partner lokal, dan setidaknya 1,4 juta orang bergabung dengan SFCG setiap tahunnya yang tidak luput dari kerja keras lebih dari 600 karyawannya dan 100 pemegang. (www.sfcg.org, 2016)

Selama 35 tahun, upaya SFCG dalam membangun perdamaian tidak terlepas dari berbagai pihak dalam memberikan dukungan seperti yayasan, perusahaan nirlaba, perusahaan, instansi pemerintah, dan lembaga multilateral berikut:

Gambar 2.1
Jaringan Kerja Sama Internasional *Search for Common Ground*



Sumber: www.sfcg.org, 2016.

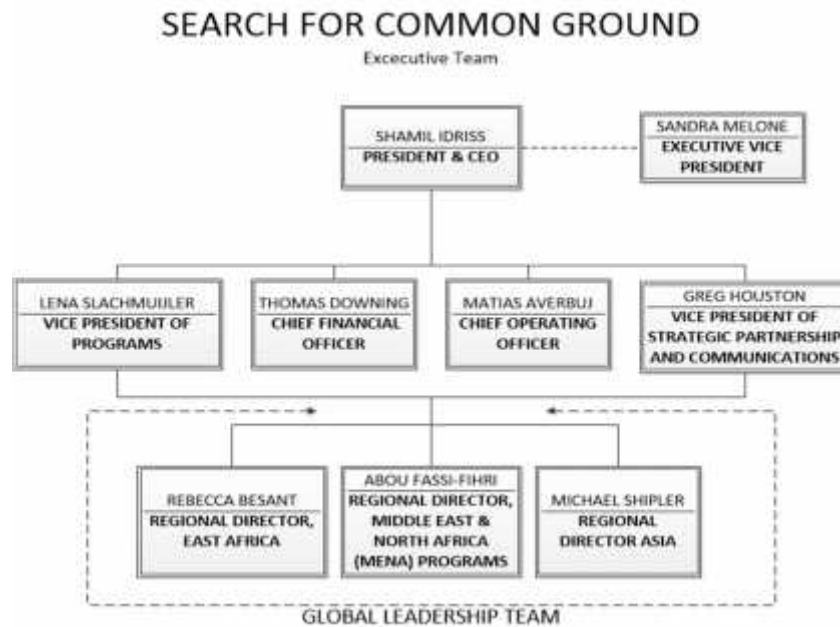
Dari gambar di atas, diketahui bahwa segala bentuk kesuksesan SFCG selama 35 tahun dalam membangun perdamaian di seluruh dunia tidak terlepas dari dukungan kerja sama internasional meskipun program kerja SFCG berbeda-beda di setiap negara tujuan. Untuk program-program yang menangani kejahatan

kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia, SFCG tidak terlepas dari dukungan UN Women dan UNICEF.

Seperti yang Penulis sampaikan pada bab sebelumnya, tujuan utama SFCG adalah untuk mengakhiri konflik dan kekerasan melalui jenis *peacebuilding* yang disebut dengan transformasi konflik. Artinya, SFCG mengobservasi keadaan sosial masyarakat untuk mengubah interaksi sehari-hari kelompok atau orang yang berkonflik sehingga mereka dapat bekerjasama untuk membangun komunitas mereka sendiri dan menentukan cara pemecahan masalah secara bersama-sama. Visi mereka adalah menciptakan perbedaan yang sifatnya mendorong kemajuan sosial, dan menghormati segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kerja sama antar umat manusia. Sedangkan misi mereka adalah mengubah cara dunia dalam menangani konflik dari pendekatan permusuhan menuju solusi-solusi yang bersifat kooperatif. (www.sfcg.org, 2016)

Seperti organisasi pada umumnya, SFCG memiliki struktur organisasi yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas bagi setiap pemimpin di dalamnya agar tercapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Berikut adalah struktur organisasi tim eksekutif SFCG beserta pemimpin-pemimpin regional di ASIA, Afrika, dan Timur Tengah:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Tim Eksekutif SFCG



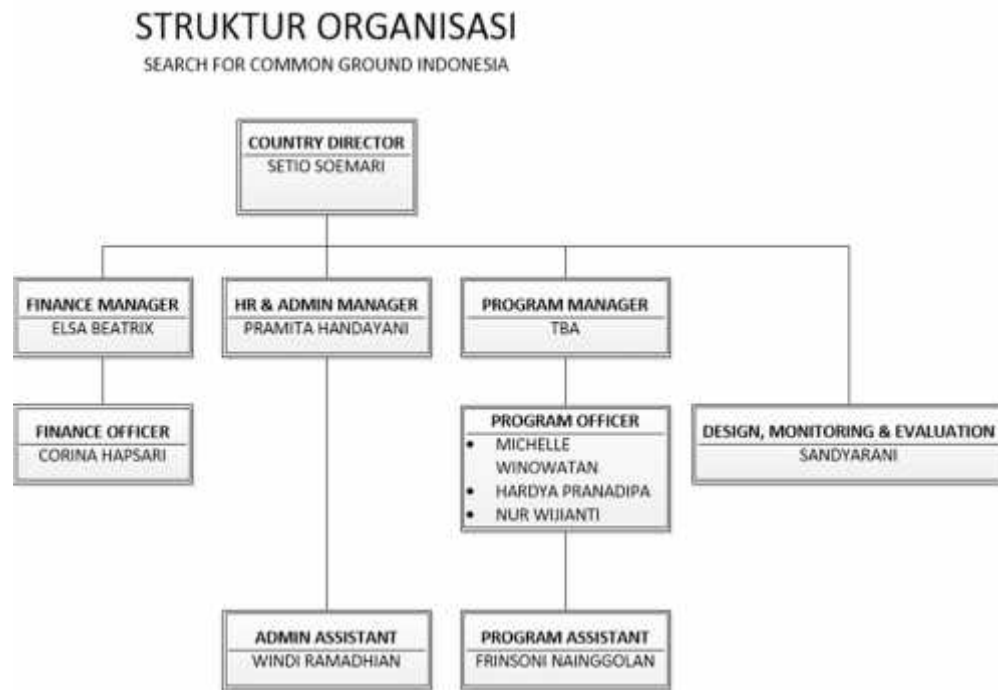
Sumber: www.sfcg.org, 2016.

Struktur organisasi di atas menunjukkan bahwa terdapat enam orang yang sangat berpengaruh ditambah tiga orang pemimpin regional atas keberlangsungan SFCG hingga sekarang, yang mengantarkan kesuksesan-kesuksesan SFCG hingga dapat bekerjasama dengan lebih dari 100 partner internasional termasuk lembaga bentukan PBB dan mengantarkan SFCG ke puncak-puncak prestasi internasional.

Di bawah kepemimpinan Michael Shipler selaku Direktur SFCG Regional ASIA, SFCG Indonesia dipimpin oleh Setio Soemari dibantu dengan 10 karyawannya, berikut adalah struktur organisasi SFCG Indonesia:

Bagan 2.2

Struktur Organisasi SFCG di Indonesia



Sumber: SFCG, 2017.

Melalui struktur organisasi di atas, terlihat bahwa Shamil Idris adalah presiden sekaligus CEO SFCG sekarang meskipun ia bukan pendiri SFCG. Shamil telah menggantikan John Mark selaku pendiri SFCG sejak tahun 2014 karena berbagai pertimbangan yang dilakukan Mark beserta istrinya.

Pada awal mula berdirinya SFCG, Mark menyadari bahwa konflik terjadi karena seseorang berfokus pada perbedaan, bukan persamaan yang mampu menimbulkan kerja sama atau interaksi positif. Sehingga menurut Mark, kemajuan akan perdamaian yang ingin diciptakan di muka bumi ini maka masyarakat harus rela

meninggalkan cara pandang yang lama, yakni konsep menang-kalah dalam mencapai sebuah tujuan. Ia kemudian meyakinkan khalayak umum bahwa kita semua adalah pemenang apabila berfokus pada tujuan bersama. Mark juga meyakinkan bahwa akan selalu ada cara lain dalam mencapai tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak atau lebih tanpa merugikan pihak yang lain (*win win solution*). (www.sfcg.org, 2016)

Pada tahun 1994, istri Mark yakni Susan Collin Mark bergabung menjadi Wakil Presiden SFCG. Untuk memaksimalkan penyebaran pesan damai, mereka membentuk sebuah divisi produksi yang diberi nama *Common Ground Productions*. *Common Ground Productions* dipercaya mampu menyampaikan pesan damai yang lebih efisien kepada masyarakat luas melalui media elektronik seperti film, *reality show*, video musik, *video game*, buku, komik, dan sebagainya. Mark dan Susan ternyata mampu membentuk pemimpin-pemimpin baru dari seluruh dunia dalam menciptakan perdamaian yang dapat dicapai secara praktis melalui inovasi-inovasi modern tersebut. (www.sfcg.org, 2016)

Pada tahun 1991, program negara pertama SFCG dimulai. Organisasi ini untuk pertama kalinya menangani konflik Israel-Palestina di Yerusalem. Pada tahun 1994, kantor pusat SFCG di Eropa mulai didirikan yang terletak di Makedonia dan Ukraina. Pada tahun 1995, kantor cabang di Brusel mulai dibuka dan pada tahun yang sama kantor pusat di Afrika juga didirikan. Program mereka yang pertama pada tahun ini dimulai dari Burundi. (www.sfcg.org, 2016)

Setelah lebih dari sepuluh tahun, *Common Ground News* yang merupakan salah satu produk dari *Common Ground Productions* mulai berfokus dalam penyampaian berita-berita yang berkaitan dengan agama khususnya yang berkaitan dengan Muslim dan Barat. Pada dasarnya, SFCG bermaksud ingin menjembatani Muslim dan Barat dalam beberapa bentuk keterbukaan informasi karena antara Muslim dan Barat sering terjadi kesalahpahaman yang berujung konflik. (www.sfcg.org, 2016)

Pada tahun 2001, SFCG secara resmi memperkenalkan timnya untuk menjalankan program di Negara Republik Kongo dan Maroko. Hingga saat ini, Negara Republik Kongo menjadi negara dengan program terbesar yang memiliki beberapa kantor cabang di satu negara dan memiliki lebih dari 100 karyawan. Pada tahun 2002, program di Asia mulai dijalankan terutama di Indonesia yang berpusat di Jakarta hingga menyebar ke daerah-daerah lain yang berpotensi konflik dan kekerasan. (www.sfcg.org, 2016)

Tahun 2008 adalah pertama kalinya SFCG menjalankan program yang berbasis sepak bola. Dengan menggabungkan daya tarik sepak bola dari penjuru dunia, hal ini dipercaya mampu menyatukan masyarakat dari segala golongan melalui perubahan sikap sosial yang akan mereka lakukan (Search for Common Ground, 2016). Pada program laga sepak bola pertama yang diproduksi oleh SFCG ini menceritakan tentang tim yang beranggotakan pemain-pemain dari beberapa daerah yang berkonflik, memiliki karakter berbeda, agama yang berbeda, dan tujuan yang

berbeda yang ternyata mampu melebur menjadi satu dalam sebuah tim yang memiliki kesamaan tujuan dan kerja sama yang solid demi sebuah pencapaian yang didambakan. Drama episode berjudul *The Team* ini berhasil ditayangkan di televisi-televisi lokal di 18 negara dan mampu mengantarkan SFCG menjadi pemenang dalam sebuah festival film di London dengan kategori *Best Film in the Human Security*. Festival film ini didukung oleh *The Westminster Branch of the United Nations Association* dan berhasil mempromosikan tiga pilar Kebebasan, yaitu: kebebasan dari keinginan, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan untuk hidup bermartabat (www.sfcg.org, 2016).

Pada tahun 2010, Pakistan, Timor Leste, Zimbabwe, dan Yaman secara serentak menjadi negara ke-20 yang menjalankan program SFCG selanjutnya. Pada tahun 2012, program SFCG yang lain dilaksanakan di Chad, Kyrgyzstan, dan Nigeria. (www.sfcg.org, 2016)

Tahun 2014, Shamil Idriss yang sudah bergabung dengan SFCG sejak tahun 1993 diangkat menjadi presiden baru SFCG menggantikan John Mark yang sudah memimpin organisasi ini selama 32 tahun. Dibawah kepemimpinan Shamil Idriss, pada tahun 2014 SFCG memulai era baru dari sebuah transformasi konflik dengan cara diplomasi tradisional dan mediasi yang diimplementasikan pada *video game* dan perangkat virtual lainnya yang diproduksi oleh *Common Ground Productions* (www.sfcg.org, 2016). Transformasi konflik yang baru ini juga diterapkan di

Indonesia yang kaya akan keanekaragaman, kebudayaan, dan *moral wisdom* yang terdapat di masing-masing daerah.

2.2.2. Peran Internal SFCG sebagai NGO yang Bekerja di Bidang

Peacebuilding

Sudah begitu banyak program yang dijalankan oleh SFCG untuk mewujudkan perdamaian di Indonesia melalui transformasi konflik jenis *peacebuilding*. Beberapa program dan aktivitas yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan anak-anak untuk membangun kembali perdamaian di Poso yang dilakukan oleh SFCG antara lain:

1. Komik Perjalanan Mencari Sahabat

Program komik Perjalanan Mencari Sahabat berawal ketika pada bulan November 2003, Bapak Gusrowi dan Bapak Setio Soemari dari SFCG melakukan observasi untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi Poso pasca konflik dibantu dengan Bapak Ibrahim dan Ibu Nurtahumil selaku masyarakat lokal Poso.

“Dulu yang berangkat (ke Poso) Mas Gusrowi sama Pak Soemari. Mereka PDKT (pendekatan) satu-dua minggu sampai agenda pertemuan anak-anak (korban konflik) Islam-Kristen. (Jumlah pesertanya) *nggak* banyak, salah satu kubu sampai belasan. Totalnya ada duapuluh sekian, *nggak* sampai 25 (anak).”²

² Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

Melalui keterangan Bapak Hardya, jumlah anak-anak korban konflik yang bergabung pada pertemuan perdana hanya 8-14 orang dari masing-masing kubu, namun mereka dinilai cukup konsisten dalam mengikuti rangkaian kegiatan karena menunjukkan eksistensinya dengan baik. Agenda pertemuan ini kemudian disebut sebagai Sekolah Darurat karena kegiatan yang diselenggarakan menyerupai sekolah sebagai tempat bermain dan belajar, darurat karena keterbatasan sarana dan prasarana pasca konflik.

Jadwal pertemuan Sekolah Darurat pada umumnya dilakukan seminggu dua kali sesuai kesepakatan hari dan waktu pada pertemuan sebelumnya. Sehingga pelaksanaan Sekolah Darurat ini bisa dikatakan fleksibel sehingga tidak membebani anak-anak korban konflik di Poso. Pada umumnya, pertemuan Sekolah Darurat dilakukan antara hari Senin sampai Jumat sesuai kesepakatan.

“Jadwalnya (pertemuan Sekolah Darurat) sebenarnya *nggak* pasti, biasanya seminggu dua kali (hari) Senin dan Jumat, kadang bisa tiga kali kalau ada *project* lain, kadang juga cuma sekali kalau hujan atau anak-anaknya *nggak* ada.”³

Dari keterangan di atas juga disebutkan bahwa halangan SFCG dalam mendekati anak-anak korban konflik melalui agenda komik ini adalah cuaca Sulawesi Tengah yang tidak menentu di akhir tahun hingga awal

³ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

tahun, dan ketersediaan waktu luang anak-anak tersebut yang seringkali membantu orang tua bekerja di kebun, hutan, pasar, dan sebagainya.

Apabila dikalkulasikan, maka dalam waktu 2 bulan sejak November 2013-Januari 2014, maka SFCG sudah melakukan pertemuan kurang lebih 16 kali bersama anak-anak Sekolah Darurat. Dalam beberapa kali disela-sela pertemuan, SFCG menemukan fakta bahwa anak-anak korban konflik gemar menggambar dan menulis dan mereka ingin melakukan hal serupa setelah sekian lama tidak melakukannya karena keterbatasan sarana dan pra sarana akibat konflik.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya SFCG menggagas sebuah komik yang bertujuan untuk menarik perhatian anak-anak karena diciptakan berdasarkan *passion* yang digabungkan antara menggambar dan mewarnai. Berbagai tokoh, karakter, dan cerita serta latar belakang diusung berdasarkan kondisi masyarakat Poso.

“Kenapa komik? Sempel, karena waktu itu kita bingung mau bikin *project* apa lagi yang lebih *ngena*, pas kita tanya mereka pengen apa jawabnya pengen menggambar dan mewarnai, ya sudah kita diskusikan dengan tim dan akhirnya bikin komik. Komik kan kolaborasi visual antara gambar dan warna...”⁴

Komik Perjalanan Mencari Sahabat mulai diperkenalkan kepada anak-anak pada bulan Februari 2004. Kontennya berisi tentang kehidupan masyarakat Poso sebelum konflik yang hidup berdampingan satu sama lain, rukun, dan saling melengkapi antara Islam dan Kristen. Komik yang

⁴ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

memiliki 30-an halaman ini dibacakan pada tiga kali pertemuan di Sekolah Darurat. Di tengah-tengah kegiatan pembacaan komik, SFCG selalu membuka termin untuk berbagi pengalaman bagi anak-anak korban konflik mengenai apa saja yang ingin mereka bagi kepada teman-temannya menyangkut topik dari komik tersebut. Tidak jarang SFCG mendorong anak-anak untuk melanjutkan kisah-kisah dalam komik sesuai imajinasi mereka yang syarat akan perdamaian.

Kehadiran komik sederhana ini ternyata mendapatkan respon positif dari anak-anak korban konflik dan mampu diterima dengan baik. Menurut Anwar Sutarman dan sepupunya Asrul yang sempat mengungsi di SD 3 Poso Kelurahan Kasigincu, komik ini yang paling menarik perhatian dan sering diperebutkan karena sebagian besar komik berisi gambar dan karakter serta warna yang lebih mencolok dan berwarna-warni dari buku-buku yang lain. Terlebih Anwar dan teman-temannya belum bisa membaca ketika konflik berlangsung, sehingga tampilan gambar dan warna-warna pada komik *Perjalanan Mencari Sahabat* menjadi buku yang paling diminati oleh anak-anak korban konflik⁵.

Hal serupa juga dialami oleh Andri Ruslam, salah satu anak korban konflik yang sangat tertarik dengan *Komik Perjalanan Mencari Sahabat* karena pesan-pesan moral yang mudah diingat olehnya dari setiap kegiatan dongeng di Sekolah Darurat. Andri sangat menyukai kegiatan

⁵ Korespondensi melalui *email* dengan Anwar Sutarman, 20 November 2017.

dongeng ini, meskipun ia belum bisa membaca ketika konflik berlangsung namun SFCCG membantunya untuk memahami arti penting perdamaian melalui visualisasi masyarakat Poso yang damai. Hingga kini, Andri masih memegang teguh arti perdamaian dari salah satu ilustrasi di komik tersebut mengenai batu-batu yang dapat disusun menjadi satu dan menjadi sesuatu yang bermakna. Menurutnya, batu adalah benda kecil namun keras dan dapat digunakan untuk melukai sesame. Apabila digunakan perseorangan dapat menimbulkan konflik karena orang-orang akan saling melempar batu. Namun apabila batu-batu tersebut dikumpulkan, maka dapat digunakan untuk menjadi pondasi (misalnya rumah) agar rumah tersebut kokoh dan tahan dari berbagai ancaman serta dapat dijadikan tempat yang aman untuk berlindung⁶.

Respon positif akan hadirnya komik tersebut semakin terasa ketika komik pertamanya tamat. Anak-anak korban konflik masih menginginkan komik serupa untuk menjadi hiburan di pengungsian, hal ini mendorong SFCCG untuk memproduksi komik seri lanjutan dari Perjalanan Mencari Sahabat. Hingga Februari 2005, Komik Perjalanan Mencari Sahabat yang sudah berganti judul utama menjadi Pesantren Terakhir memiliki 6 seri cerita yang berbeda, antara lain Pesantren Terakhir: Teka-Teki Tiga Bersaudara, Amanah Tiga Bersaudara, Hikmah Perbedaan, Jejak-Jejak

⁶ Korespondensi dengan Andri Ruslam melalui *email*, 20 November 2017.

Sahabat Alam, Kerjasama Tanpa Prasangka, dan Dunia adalah Pesantren Kita.

Jika dikalkulasikan secara keseluruhan, SFCG sudah melakukan ± 21 kali pertemuan dengan agenda mendongeng enam seri komik Pesantren Terakhir dan satu komik Perjalanan Mencari Sahabat yang dilakukan sepanjang Februari 2004 hingga Februari 2005. Kalkulasi tersebut didapat dari 1 seri komik yang dibaca pada tiga kali pertemuan, sedangkan 21 pertemuan didapat dari 7 komik dikali 3 kali pertemuan. Sedangkan masa produksi komik adalah 1-2 bulan.

Berbagai testimonial diberikan oleh murid-murid Sekolah Darurat seperti Upi (17) dan Atik (15) yang menyukai komik tersebut karena gambar serta karakternya yang bagus dan ceritanya selalu menarik, Zilvia (15) yang sangat menyukai karakter-karakter di dalamnya karena mudah dipahami dan sesuai dengan kehidupan di lingkungannya, dan Deni (13) yang kini bisa lebih mengetahui kehidupan agama lain yang berbeda dengannya sehingga lebih menghormati perbedaan. (Pesantren Terakhir, p. 35)

2. *Leading Fellowship Program (LFP)*

Leading Fellowship Program atau LFP adalah program yang fokus pada pengembangan dan penguatan kapasitas kepemimpinan dalam inisiatif-inisiatif bina damai (*peacebuilding initiatives*). Program ini

berpegang teguh pada prinsip-prinsip Kepemimpinan Bijak (*wise leadership*) yang dikembangkan oleh SFCG yaitu, Kepemimpinan dari Hati (*Authentic Leadership*), Kepemimpinan untuk Semua (*Leadership for the whole*) dan Kepemimpinan dengan Kasih Sayang (*Compassionate Leadership*). Dari program ini SFCG berharap bisa memunculkan para pemimpin dan calon pemimpin yang bervisi otentik dalam melakukan perubahan dan membangun perdamaian di masyarakat. (www.sfcg.org, 2014)

Kegiatan ini dilaksanakan sepanjang tahun 2014-2016 di berbagai kota di Indonesia seperti Semarang, Surakarta, Purwokerto, Bandung, Bogor, Sukabumi, Jakarta, Palu, Poso, dan Serang dengan sistematika membuka forum diskusi di tempat-tempat yang telah ditentukan seperti SMA dan Universitas. Selama berjalannya program ini, lebih dari 1000 pelajar dan mahasiswa telah tergabung dalam *roadshow* LFP dari SFCG. (Search for Common Ground, 2015, pp. 5-8)

Di Poso, kegiatan LFP dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2015 di SMA N 1 Poso, Madrasah Aliyah Al-Ikhlash, dan STAI Poso dengan total peserta 100 orang. Sedangkan di Palu, kegiatan LFP dilaksanakan pada tanggal 19-21 Desember 2015 di Universitas Al-Khaairat Palu, SMA Madani, SMA Al-Khaairat, dan Universitas Tadulako

dengan jumlah peserta 25 orang di masing-masing tempat. (Search for Common Ground, 2015, p. 15)

Pada umumnya materi yang diberikan memiliki kesamaan konten, tujuan, dan metode yang digunakan termasuk kegiatan LFP di Poso dan Palu, antara lain:

Tabel 2.3
Materi, Tujuan, dan Metode yang Digunakan dalam *Leading Fellowship Program*

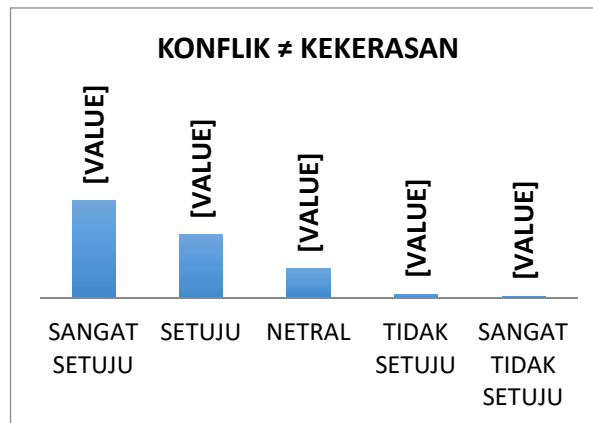
No.	Materi	Tujuan	Metode
1.	Manajemen Konflik dan Fasilitasi Pelatihan.	Membekali siswa dengan keterampilan untuk melakukan pelatihan manajemen konflik; Menyediakan lokakarya praktikum tambahan kepada para siswa.	<i>Training for trainers</i> (ToT) dan simulasi pelatihan.
2.	Pemetaan konflik dan Intervensi.	Membekali siswa dengan keterampilan untuk memetakan konflik yang terjadi kapan pun di dalam komunitas mereka; Memahami bagaimana konflik muncul dan dasar konflik itu sendiri, terutama pada aktor, posisi, dan kepentingan; Menekankan konsep 'tidak berbahaya' dalam pelatihan konflik.	Diskusi kelompok; Fasilitasi yang dipandu.
3.	Perkenalan kepada Studi Perdamaian dan Tindakan Tanpa Kekerasan.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep perdamaian, kekerasan, dan konflik; Untuk meningkatkan keterampilan dalam memerangi isu-isu tertentu dengan tindakan tanpa kekerasan.	Perkuliahan dan diskusi terbuka.
4.	Memahami Kekerasan Ekstrimisme.	Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami keberadaan narasi dan gerakan ekstremis yang keras; Untuk memahami ekstremisme kekerasan dengan mempelajari bagaimana menanggapi narasi dan aktivitas kekerasan jika hadir di kampus mereka.	Kelompok studi kasus; Diskusi kelompok.

Sumber: Laporan Triwulanan #9 SFCG, Hal. 7

Sesuai tujuan program kegiatan, maka hasil dari program LFP yang dilaksanakan selama dua tahun dengan melibatkan 1.046 pelajar dan mahasiswa secara keseluruhan di 10 kota, 175 peserta dari Sulawesi Tengah yang terdiri dari 100 peserta dari Poso dan 75 peserta dari Sulawesi Tengah. Dari total peserta menyatakan bahwa pertanyaan “Apakah kegiatan yang telah diselenggarakan dapat membantu Anda dalam ...” menghasilkan jawaban:

Gambar 2.2

Survey: Apakah Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Membantu Anda dalam Memahami bahwa Konflik Tidak Sama Dengan Kekerasan?

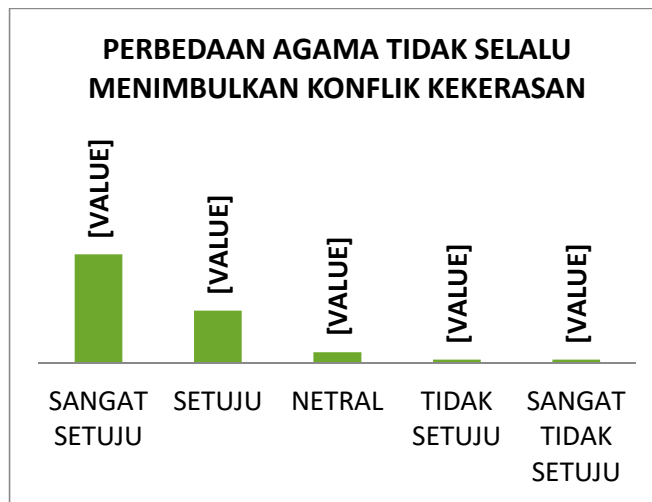


Sumber: Laporan Triwulanan #9 SFCG, Hal. 19.

Dari Gambar 2.2 di atas dapat kita ketahui bahwa program LFP dalam membantu pemuda Sulawesi Tengah untuk memahami bahwa Konflik Tidak Sama Dengan Kekerasan menunjukkan sebanyak 57% partisipan sangat setuju, 28% setuju, 11% netral, 2% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju. Sedangkan untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilaksanakan membantu partisipan dalam memahami bahwa perbedaan

tidak selalu menimbulkan konflik kekerasan dapat terlihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 2.3
Survey: Apakah Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Membantu Anda dalam Memahami bahwa Perbedaan Tidak Selalu Menimbulkan Konflik Kekerasan?

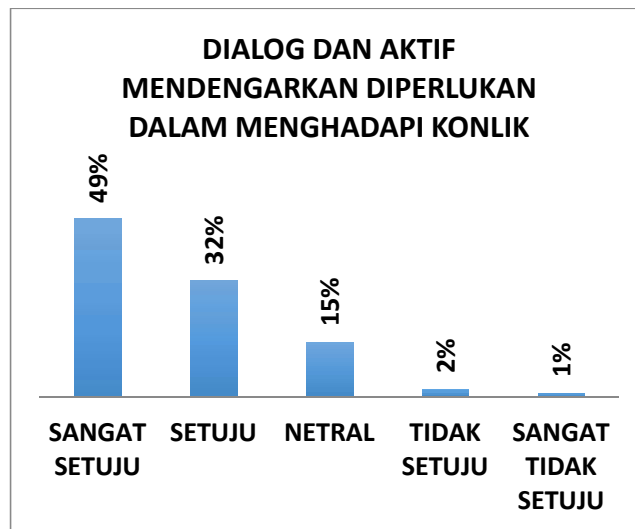


Sumber: Sumber: Laporan Triwulanan #9 SFCG, Hal. 19.

Pada Gambar 2.3 menunjukkan bahwa Perbedaan Tidak Selalu Menimbulkan Konflik Kekerasan menunjukkan bahwa 60% peserta sangat setuju, 29% setuju, 6% netral, 2% tidak setuju, dan 2% juga tidak setuju. Dan untuk *survey* apakah kegiatan tersebut membantu peserta dalam memahami bahwa dialog dan mendengarkan secara aktif diperlukan dalam menghadapi konflik ditunjukkan dengan hasil berikut:

Gambar 2.4

Survey: Apakah Kegiatan yang Telah Dilaksanakan Membantu Anda dalam Memahami bahwa Dialog dan Mendengarkan secara Aktif Diperlukan dalam Menghadapi Konflik?



Sumber: Sumber: Laporan Triwulanan #9 SFCG, Hal. 20.

Pada Gambar 2.4 menunjukkan bahwa Dialog dan Mendengarkan secara Aktif Diperlukan dalam Menghadapi Konflik mendapatkan hasil 57% dari peserta sangat setuju, 28% setuju, 11% netral, 2% tidak setuju, dan 2% sangat tidak setuju.

Seperti kegiatan pada umumnya, rangkaian kegiatan LFP juga menemui beberapa kendala seperti kurangnya waktu dalam menyelesaikan semua materi dalam satu kali pertemuan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang pada umumnya adalah keterlambatan dalam memulai acara dari pihak pesertanya sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa peserta tidak mengikuti *workshop* dari awal hingga akhir. Pada tingkatan universitas, beberapa peserta yang sudah mengkonfirmasi kehadiran tidak datang pada

saat pelaksanaan kegiatan dengan alasan bertabrakan dengan jadwal kuliah atau kegiatan lain. Beberapa kendala juga dirasakan atas ketidakaktifan peserta di Sulawesi Tengah apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa sehingga *workshop* cenderung biasa saja, tidak jauh berbeda dengan kegiatan belajar di kelas.⁷

Namun kendala di atas dapat diatasi dengan tetap melanjutkan kegiatan sesuai jadwal tanpa saling tunggu antara fasilitator dengan peserta, bahkan tetap melanjutkan agenda meski tanpa peserta yang sudah mengkonfirmasi kehadirannya namun tidak dapat hadir. Untuk meningkatkan keaktifan peserta di Sulawesi Tengah dapat diatasi dengan kuis-kuis berhadiah cendera mata SFCG seperti *goodie bag*, kaos, buku catatan, stiker, pin, atau gantungan kunci sehingga mampu merangsang partisipasi peserta selama berjalannya kegiatan LFP.⁸

3. *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*

Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity merupakan sebuah rangkaian kegiatan guna mendapatkan pemahaman dan kapasitas dalam resolusi konflik, bina damai, serta mengelola dan bekerjasama dengan media namun dalam bentuk pelatihan dalam beberapa hari. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara SFCG dengan *Asian Muslim Action Network* (AMAN) dalam merespon berbagai konflik yang marak terjadi terlebih

⁷ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

⁸ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

menyangkut intoleransi antar umat beragama (Search for Common Ground, 2015).

Di Sulawesi Tengah, *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity* dilaksanakan pada tanggal 7-11 Mei 2015 di Universitas Tadulako, Palu dengan mengundang 46 peserta dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Sulawesi Tengah seperti Universitas Tadulako, SMA 1 Poso, MA Al-Khaairat Poso, SMA Madani, Universitas STAI Poso, SMA 4 Palu, SMA Al-Khaairat Pusat Palu, SMA Al-Ikhlas, dan MA Aliyaaliklas. Pada umumnya materi yang disampaikan sama dengan materi LFP karena memang program ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari LFP. Namun di kegiatan *camp* ini, peserta dikelompokkan berdasarkan peminatan kedalam dua grup besar yakni *Peace Leaders Group* yang bertujuan untuk menjadi inisiator bina damai, dan *Multimedia Training for Peacebuilding* yang bertujuan untuk memproduksi konten-konten kampanye perdamaian kreatif.⁹

⁹ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

Berikut adalah daftar peserta *Peace Leaders Camp: Collaboration in*

Diversity:

Tabel 2.4
Daftar Peserta *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*
Sulawesi Tengah 2015

No.	Nama	Institusi	No.	Nama	Institusi
1.	Rahmawati	Univ. Tadulako	24	Andri Wahyu Ahmad Ruslam	SMA N 1 Poso
2.	Nuraida		25	Ardianto	MA Al- Khairaat Poso
3.	Moh Rizaldi		26	Rifka Dwi Octaviany	
4.	Rusmawanti		27	Dyah Ayu Agnsyah	
5.	M. Fahrur Razy		28	Fitrah Marfiah	SMA N 4 Palu
6.	Muh Rifki M. Pallu		29	Andita Nur Safitri	
7.	Menaen I Beri		30	M. Sayyidil Maulana	
8.	Endah Purwanti S	31	M. Zarfandi		
9.	Andi Muh. Yusril	32	Rahmayani	SMA Al- Khairaat Puspa	
10.	Bagus Prasetyo Pratomo	33	Widya Vitasari		
11.	Timothy Eka Prasetya	34	Fanni Karlia Aprillia	SMA Al- Khairaat Puspa	
12.	Sundari Sahrin	35	Galih Larasati		
13.	Kurnia Widyawati Sudin	36	Zainab Syifa		
14.	Abd. Rahim	37	M. Nabil		
15.	Fahrul Salman	38	Alifudin		
16.	Siti Maulidayanti	39	Wawan Setiawan	SMA Al- Ikhlas MA Al- Ikhlas Poso	
17.	Alwandi Kasep	40	Sri Wahyuni		
18.	Rayzka Sam Vieri	SMA N 1 Poso	41	Rifka Dwi Octaviany	SMA Model Terpadu Madani
19.	Mirna Liza Shafitri		42	Ismiwati Marzuki	
20.	M. Anwar Sutarman		43	Rian Andika Muhammad	
21.	Atikah Maryati Rabbie		44	Cindy Vita Monoarfa	
22.	Mauren Evelin Maria Maksum		45	Raisa Adjeng Aldhiza	SMA N 4 Palu
23.	Moh Farhan Syafii		46	Abu Abdi Rahman	

Sumber: Laporan Triwulan SFCG Juli 2015, Hal. 25-27.

Sesuai daftar peserta di atas, 46 pelajar dan mahasiswa terpilih dari Poso dan Palu dikelompokkan menjadi dua grup besar yang memiliki fokus materi berbeda namun saling berkaitan. Dalam *Peace Leaders Group*, para peserta akan lebih mendalami ketujuh materi dimana empat materi sama dengan materi dalam pelaksanaan LFP, mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi bersama tokoh-tokoh masyarakat lokal yang sengaja diundang untuk mengisi kegiatan ini seperti Bapak Moch. Ridwan selaku wartawan lokal, *movie screening*, diskusi kelompok sesuai studi kasus, hingga permainan-permainan yang dapat mengasah logika berpikir dalam menyelesaikan konflik yang dipandu oleh Bapak Gusrowi, Bapak Hardya Pranadipa, Bapak Suryaji, Ibu Anggita Paramestri, dan Ibu Tika dari SFCG. Berikut adalah tujuh materi, tujuan, dan metode yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*:

Tabel 2.5
Acuan Materi, Tujuan, dan Metode yang Digunakan dalam Program *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*

No.	Materi	Tujuan	Metode
1.	Manajemen Konflik dan Fasilitasi Pelatihan.	Membekali siswa dengan keterampilan untuk melakukan pelatihan manajemen konflik; Menyediakan lokakarya praktikum tambahan kepada para siswa.	<i>Training for trainers</i> (ToT) dan simulasi pelatihan.
2.	Pemetaan konflik dan Intervensi.	Membekali siswa dengan keterampilan untuk memetakan konflik yang terjadi kapan pun di dalam komunitas mereka; Memahami bagaimana konflik muncul dan dasar konflik itu sendiri, terutama pada aktor, posisi, dan	Diskusi kelompok; Fasilitasi yang dipandu.

No.	Materi	Tujuan	Metode
		kepentingan; Menekankan konsep 'tidak berbahaya' dalam pelatihan konflik.	
3.	Perkenalan kepada Studi Perdamaian dan Tindakan Tanpa Kekerasan.	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang konsep perdamaian, kekerasan, dan konflik; Untuk meningkatkan keterampilan dalam memerangi isu-isu tertentu dengan tindakan tanpa kekerasan.	Perkuliahan dan diskusi terbuka.
4.	Memahami Kekerasan Ekstrimisme.	Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memahami keberadaan narasi dan gerakan ekstremis yang keras; Untuk memahami ekstrimisme kekerasan dengan mempelajari bagaimana menanggapi narasi dan aktivitas kekerasan jika hadir di kampus mereka.	Kelompok studi kasus; Diskusi kelompok.
5.	Sosial media dan Strategi Komunikasi dalam <i>Peacebuilding</i> .	Membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola rumor dan memahami bahaya narasi ekstremis di media sosial; Untuk meningkatkan kemampuan siswa menciptakan kampanye perdamaian untuk melawan narasi kekerasan dan pidato kebencian di media sosial	Praktik sosial media; Membuat akun sosial media.
6.	Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian.	Memberikan pengetahuan tentang pentingnya kepercayaan dalam proses perdamaian; Mempelajari bagaimana membangun dan mempertahankan kepercayaan saat terlibat dengan semua pemangku kepentingan konflik.	Pertandingan; Belajar eksperiensial.
7.	Mempertahankan Gerakan Berkelanjutan	Membangun mekanisme gerakan perdamaian yang berkelanjutan di kalangan siswa; Membentengi proses rekrutmen melalui roadshow; Meningkatkan pelatihan pengembangan kapasitas	Diskusi <i>Brainstorming</i> ; Fasilitasi yang dipandu.

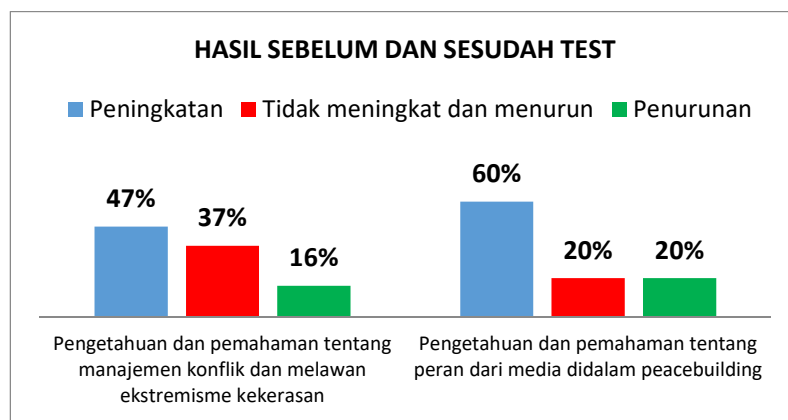
Sumber: Laporan Triwulanan #9 SFCG, Hal. 7-8

Sedangkan untuk *Multimedia Training for Peacebuilding*, para peserta dipandu dan dilatih secara eksklusif oleh Kakak Trisno Adi dan Kakak Nor Ismah dari *Common Ground Production*. Para peserta dari pelatihan

ini akan mendapatkan materi untuk membuat video dokumenter yang baik dan benar, membuat konten dan mendesain *blog* yang kreatif dan berbobot, serta membuat desain visual agar gambar yang diciptakan lebih menarik dan lebih hidup. (Search for Common Ground, 2015, pp. 10-11)

Untuk memantau efektivitas dari kegiatan ini, SFCG melakukan *mini survey* melalui *pre* dan *post-test* untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman yang diterima oleh peserta dalam menyerap materi yang diberikan oleh fasilitator mengenai konflik, kekerasan, dan media. Tes tersebut memuat 17 pertanyaan yang terdiri dari 6 soal tentang manajemen konflik, 6 tentang media dalam *peacebuilding*, dan 5 soal mengenai multimedia. Dari 46 partisipan, 17 soal-soal tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 2.5
Survey Peserta dalam Memahami Manajemen Konflik, Menghindari Kekerasan Ekstrimisme, dan Penggunaan Media sebagai Bagian Peacebuilding



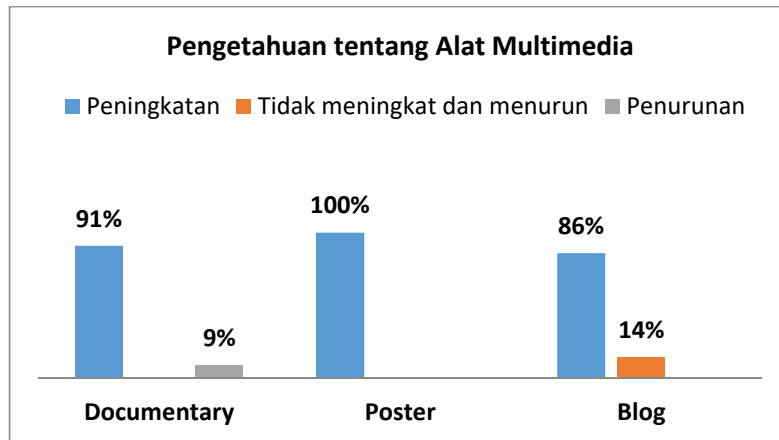
Sumber: Laporan Triwulanan SFCG Juli 2015, Hal.18.

Melalui penemuan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 47% peserta mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman dalam manajemen konflik serta pengetahuan terkait melawan kekerasan ekstremisme. Hasil tes juga menunjukkan bahwa 37% peserta lebih memilih pendekatan tanpa kekerasan sembari mengelola konflik, dan 16% diantaranya menghindari diskriminasi berbasis agama dan etnis.

Pada gambar memahami media sosial dalam mewujudkan *peacebuilding*, 60% peserta memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh media terhadap konflik dan perdamaian, peran media dapat mempengaruhi stereotip masyarakat, dan melalui media dapat diimplementasikan sebagai alat untuk membangun perdamaian (*peacebuilding*). Tes tersebut juga menunjukkan bahwa 20% peserta merasa lebih optimis dengan kemampuan dan peran mereka dalam menggunakan media sebagai alat untuk membangun perdamaian yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan untuk *survey* mengenai pelatihan multimedia dalam mewujudkan perdamaian, SFCG menemukan bahwa:

Gambar 2.6
Perkembangan Kemampuan Peserta dalam Menghasilkan Produk Multimedia



Sumber: Laporan Triwulanan SFCG Juli 2015, Hal. 19

Melihat gambar di atas menunjukkan hasil yang berkaitan dengan tingkat perubahan peserta terhadap ketrampilan dan pengetahuan mereka dalam menghasilkan produk multimedia. Pertanyaan-pertanyaan ini lebih berkaitan dengan keterampilan teoritis dan teknis tentang bagaimana menghasilkan produk multimedia tertentu seperti Video Dokumenter, Desain Poster, atau Konten dan Desain Blog. Hampir semua peserta, sekitar 91% memperoleh lebih banyak pengetahuan mengenai teori dasar pembuatan video dokumenter, prinsip, serta keterampilan teknis dasar dari tahap pra-produksi dan produksi pembuatan video dokumenter.

Adanya pelatihan untuk desain poster sangat efektif karena hasil *survey* menunjukkan bahwa 100% peserta mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai teori dasar dan prinsip merancang poster,

copywriting, dan tipografi, serta keterampilan tentang bagaimana untuk menggunakan program desain seperti *Corel Draw* dan *Adobe Photoshop*.

Untuk kemampuan pelatihan *Blog*, 86% mendapatkan lebih banyak pengetahuan terkait teori dasar *blogging* serta ketrampilan tentang cara membuat konten dan desain yang bagus untuk *blogging*. Para peserta juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana seseorang bisa meningkatkan arus *blog* mereka. (Search for Common Ground, 2015, pp. 18-19)

Dalam menjalankan program ini, SFCG menemui beberapa kendala yang berkaitan dengan izin orang tua peserta. Mengingat program ini bukan kegiatan formal lembaga pendidikan, SFCG cukup kesulitan untuk mengajak peserta khususnya pelajar SMA. Orang tua terlalu khawatir akan berbagai bentuk pelatihan oleh pihak asing yang akan diselenggarakan di Poso, terlebih yang memuat topik konflik dan perdamaian. Namun SFCG dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada orang tua melalui jadwal kegiatan dan gambaran kegiatan yang dikirim melalui *e-mail* kepada para peserta. Kendala lain datang ketika agenda pemutaran film dokumenter dibatalkan oleh pihak Universitas Tadulako selaku penyedia tempat pelatihan (*camp*). Hal ini dinilai terlalu sensitif bagi masyarakat Poso karena film tersebut menggambarkan kehidupan Muslim Syiah dan Ahmadiyah di Purwokerto. Hal ini

dikhawatirkan akan berdampak pula pada kerukunan umat beragama di Poso yang masih belum stabil.¹⁰

4. *Student Initiatives on Peacebuilding*

Student Initiatives on Peacebuilding merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelajar SMA/ sederajat tentang bahaya kekerasan ekstrimisme dan mengembangkan kapasitas kepemimpinan serta untuk menghentikan perekrutan anak muda kedalam gerakan kekerasan ekstrimisme (www.sfcg.org, 2015). Program ini juga merupakan respon SFCG atas keresahan masyarakat dalam menyikapi isu terorisme yang menyebar di Sulawesi Tengah, terlebih setelah tertangkapnya seorang kepala pesantren Tanfizul Al-Qur'an M. Basri oleh Densus 88 di Makasar, Sulawesi Selatan pada bulan April 2015 yang ternyata berafiliasi dengan ISIS. (Search for Common Ground, 2015, p. 7)

Program ini berlangsung selama satu semester sejak Agustus 2015- Februari 2016 di beberapa sekolah seperti SMA N 4 Palu, SMA Al-Khairaat, SMA N 1 Poso, SMA N Terpadu Madani, dan MA Al-Ikhlas dengan peserta seluruh siswa-siswi kelas X dan XI atau sederajat. Program ini berlangsung melalui mata pelajaran agama tambahan yang pada umumnya berlangsung selama 2 jam pelajaran atau 2 X 45 menit

¹⁰ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

menjadi 3 jam mata pelajaran atau setara dengan 135 menit dalam satu minggu dibagi ke dalam dua kali pertemuan.¹¹

Dalam menjalankan program ini, SFCG bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia untuk menerbitkan modul pendidikan berbasis keagamaan berjudul Penguatan Kolaborasi Lintas Iman agar informasi dan materi yang dimuat dapat lebih dipertanggungjawabkan¹². Kerja sama ini juga bentuk realisasi pertemuan antar *stakeholders* yang diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2015 di kantor Dirjen Pemasarakatan Jakarta karena Kemenag dianggap akan lebih mendalam dalam memberikan materi keagamaan daripada Dinas Pendidikan (Search for Common Ground, 2015, p. 14).

Dalam pelaksanaannya, SFCG lebih banyak berinteraksi dengan bapak/ibu guru yang dipercaya mampu mentransfer ilmu berdasarkan acuan pada modul secara efektif dan efisien kepada para siswa daripada tim SFCG yang terjun langsung ke lapangan karena tidak memiliki latar belakang sebagai pendidik¹³. Sehingga sebelum program dimulai, tenaga pendidik tersebut sudah menjalani rangkaian pembekalan yang difasilitasi oleh SFCG. Dalam pembekalan tersebut, para tenaga pengajar juga dibekali dengan video dokumenter yang menyoroti pengalaman

¹¹ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

¹² Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

¹³ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

reintegrasi pasca pelepasan beberapa pelanggar ekstrimis sehingga kegiatan belajar mengajar tidak terasa membosankan hanya dengan memberikan materi yang bersifat teoritis.

Total terdapat tiga video dokumenter yang dibagikan kepada guru/tenaga pendidik dengan berbagai durasi seperti video 5 menit, video 24 menit, dan video 50 menit. Pada video 5 menit menampilkan wawancara singkat dan profil dari tiga mantan pelaku ekstrimis: Joko "Hanzolah" Purwanto, Amir Abdillah, dan Zein Effendy. Video berdurasi 24 menit menceritakan kisah Hanzolah, termasuk latar belakangnya, pengalamannya saat berada di penjara, dan hidupnya setelah dibebaskan dari penjara. Sedangkan video dokumenter 50 menit mendokumentasikan terorisme di Indonesia dan merinci peluang dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam menghadapi reintegrasi sosial mantan terdakwa teroris. (Search for Common Ground, 2015, p. 15).

Berikut adalah gambaran kegiatan belajar siswa-siswi yang mendapatkan pelajaran keagamaan tambahan berdasar modul yang telah disusun oleh SFCG:

Gambar 2.7
Dokumentasi Kegiatan *Student Innitiatives in Peacebuilding* SMA Al-Khairaat Poso



Sumber: Dokumentasi SFCG, 2016.

Dokumentasi di atas adalah gambaran kegiatan belajar melalui program *Student Innitiatives on Peacebuilding* di SMA Al-Khairaat Poso. Terlihat para siswa sedang menyaksikan video dokumenter yang diputar oleh bapak/ibu guru mengenai dampak kelompok ekstrimis yang merugikan orang-orang terdekat.

Selama satu semester, SFCG turut berkontribusi terhadap 416 pelajar di Poso dan Palu untuk menyikapi gerakan radikal dan menghindari perekrutan kelompok ekstrimis yang menasar anak-anak muda usia sekolah di Sulawesi Tengah. Keefektifan program ini dipantau langsung oleh SFCG melalui evaluasi bulanan kepada bapak/ibu guru secara bergantian di sekolah-sekolah terpilih di Poso dan Palu. Selain itu, SFCG juga melakukan *survey* pada bulan ke-enam kepada 416 pelajar dari SMA N 4 Palu, SMA Al-Khairaat, SMA N 1 Poso, SMA N Terpadu Madani, dan MA Al-Ikhlas mengenai keefektifan program *Student Innitiatives on*

Peacebuilding dalam membantu mencegah perekrutan anak muda ke dalam kelompok ekstrimis. Dari kelima sekolah tersebut menghasilkan data berikut:

Gambar 2.8
Hasil Survey *Student Innitiatives on Peacebuilding*
Agustus 2015-Februari 2016

76%	Siswa memahami bahaya kekerasan ekstrimisme setelah mengikuti program.
82%	Siswa yakin untuk menjauhi kelompok manapun yang terindikasi kekerasan ekstrimis/radikal.
94%	Siswa sepakat bahwa toleransi antar umat beragama sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan interaksi sosial.
96%	Siswa percaya bahwa toleransi dan kolaborasi antar agama harus dipromosikan lebih lanjut di komunitas mereka.

Sumber: Laporan SFCG 2016. Hal 21.

Hasil *survey* di atas menunjukkan terjadi peningkatan kesadaran sebanyak 76% pada 416 siswa akan isu kekerasan ekstrem dan ketidaksetujuan terhadap tindakan ekstrimis sehingga 82% diantaranya akan menghindari kelompok/organisasi yang terindikasi kekerasan ekstrimisme. Selain itu, lebih dari 90% siswa juga menjadi lebih sadar akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar agama untuk mencegah konflik kekerasan di masa yang akan datang.

Kendala yang dialami SFCG selama enam bulan pelaksanaan program berkisar pada waktu pelaksanaan ujian akhir semester (UAS) yang jatuh pada awal Desember dan liburan sekolah/madrasah yang berpengaruh pada jumlah pertemuan menjadi tidak sesuai target. Apabila tidak terjadi

hambatan, maka pertemuan seharusnya berlangsung 24 kali, namun pada pelaksanaannya hanya sekitar 19 kali karena terpotong satu pertemuan persiapan ujian semester, satu pertemuan untuk UAS, satu pertemuan untuk *meeting class*, dan dua pertemuan terpotong akibat liburan. Namun hal ini tidak menjadi kendala yang besar karena dapat diatasi dengan percepatan jam pelajaran oleh guru sehingga materi dapat tetap tersampaikan kepada para siswa.¹⁴

5. Festival Cipta Damai: *Peace 360*

Festival Cipta Damai bertajuk *Peace 360* adalah rangkaian kegiatan selama 60 hari oleh SFCG untuk memperingati tiga hari perdamaian yang berlangsung selama tanggal 19 September-17 November 2015. Tiga hari perdamaian itu adalah Hari Perdamaian Internasional tanggal 21 September, Hari Tanpa Kekerasan Internasional tanggal 2 Oktober, dan Hari Toleransi Internasional tanggal 16 November (Search for Common Ground, 2015).

Filosofi *Peace 360* berasal dari 3 hari perdamaian yang diperingati selama 60 hari. *Peace 360* juga dapat diartikan bahwa perdamaian dapat diwujudkan dengan berbagai cara dari sisi manapun, seperti halnya lingkaran yang dapat dilihat dari berbagai sisi karena memiliki 360 derajat tak berujung.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

¹⁵ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

Pada umumnya kegiatan ini dilaksanakan oleh pemuda daerah alumni *Peace Leaders Camp* sebagai bentuk realisasi atas pelatihan yang pernah diterima. Di Poso, kegiatan ini diselenggarakan oleh 17 alumni *Peace Leaders Camp* yang berasal dari SMA 1 Poso, STAI Poso, MA Al-Ikhlas Poso dan MA Al-Khairaat Poso pada tanggal 15-18 Desember 2015 di SMA N 1 Poso.

Ketujuhbelas alumni *Peace Leaders Camp* melaksanakan kegiatan selama dua hari yang didukung sepenuhnya oleh SFCG berupa pendanaan, pendampingan, dan bimbingan. Festival Perdamaian yang dilaksanakan di SMA N 1 Poso tersebut memiliki kapasitas hingga 100 peserta yang berasal dari SMA alumni. Acara tersebut dibagi ke dalam dua termin, yakni pelatihan atau *workshop* pada hari pertama dan pemutaran film di hari kedua. Pelatihan yang dipandu oleh alumni *Peace Leaders Camp* ini mengusung topik manajemen konflik dan penggunaan media sosial dengan bijaksana untuk membantu mewujudkan perdamaian, sesuai dengan yang pernah mereka terima dari mentor-mentor SFCG di program *Peace Leaders Camp* sebelumnya. Dengan demikian, melalui pelatihan oleh alumni berarti turut menyebarluaskan metode-metode dan pesan damai kepada masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Sebuah hambatan terjadi di hari kedua yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan pemutaran film dan diskusi terbuka. Terdapat

peringatan keamanan oleh militer dan Polisi di Poso karena pada kala itu sedang gencar dilaksanakan operasi militer untuk memburu kelompok teroris Santoso. Hal ini menyebabkan agenda pemutaran film dan diskusi terbuka tidak terlaksana pada program *Peace 360* di Poso (Search for Common Ground, 2015, p. 15). Untuk peristiwa tak terduga seperti ini para alumni dan SFCG tidak dapat berbuat banyak selain mematuhi instruksi aparat keamanan setempat karena menyangkut keamanan bersama.

Kelima program di atas adalah bagian besar dari peran SFCG dalam membangun perdamaian di Poso pasca konflik tahun 2009-2016. Menurut salah penanggungjawa program Bapak Hardya Pranadipa, sebenarnya SFCG hanya memiliki dua program utama untuk Poso yaitu Komik Perjalanan Mencari Sahabat pada tahun 2004 dan festival perdamaian bertajuk Cipta Damai tahun 2015. Namun kegiatan-kegiatan di atas berkembang mengikuti situasi sosial masyarakat di Sulawesi Tengah dan antusiasme pemuda jaringan SFCG¹⁶.

¹⁶ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

2.3. Peran Eksternal *Search for Common Ground* dalam Mewujudkan Perdamaian di Poso tahun 2009-2016

2.3.1. Pemerintah Indonesia

Selama konflik 1998-2001, Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan intervensi dengan menjadi mediator melalui pasukan keamanan maupun perundingan damai. Dari sinilah kerja keras Pemerintah berbuah manis dengan terselenggaranya berbagai perundingan yang mampu meredam keadaan masyarakat Poso seperti perundingan damai oleh Gubernur, Kapolda, dan Danrem tanggal 18 April 2000, Deklarasi Malino, dan intervensi pemerintah lainnya terkait kepemilikan senjata dan kependudukan di Poso. Atas berlakunya Deklarasi Malino sejak Desember 2001, kondisi keamanan Poso mulai membaik ditandai dengan dibukanya kembali beberapa ruas jalan yang pernah ditutup oleh kelompok Islam maupun Kristen, dan beberapa organisasi non-pemerintah mulai memasuki Poso untuk membantu mewujudkan perdamaian di Poso termasuk *Search for Common Ground*. (McRae, 2016, p. 221)

Setelah masuknya Pemerintah ke Poso pasca konflik yang sebelumnya sempat mengalami penolakan, hal ini membukakan kesempatan bagi berbagai organisasi non-pemerintah baik lokal, nasional, maupun internasional seperti SFCG untuk bekerja di bidangnya. Beberapa kerja sama SFCG dengan Pemerintah antara lain:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
(Menkopolkam) Republik Indonesia

“...dulu ada *sowan* ke Menkopolkam tahun 2004, awal banget pas SCFG datang di Indonesia...sebelum program berjalan karena waktu itu yang pertama bergerak *kan* pemerintah tahun 2001 dibawah komando SBY sama JK...”¹⁷

Dalam sejarahnya, SFCG tidak dapat membaur dengan masyarakat Sulawesi Tengah khususnya Poso tanpa adanya informasi dan bimbingan dari Menkopolkam RI. Sebuah kunjungan dilaksanakan SFCG yang diwakili oleh *Country Director* Brian Hanley dan didampingi oleh Indrian Lubis dan Maryam Nainggolan pada tanggal 8 Maret 2004. Menkopolkam RI dipilih oleh SFCG karena dianggap sebagai salah satu promotor perdamaian di Poso pasca konflik pada tahun 2001 di bawah komando Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang bekerjasama dengan Bapak Jusuf Kalla sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra). Sehingga SFCG menganggap bahwa Menkopolkam memiliki banyak informasi yang dibutuhkan tentang keadaan Poso pasca konflik.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Menkopolkam RI, Jakarta Pusat ini tidak hanya untuk memperkaya informasi, namun juga strategi dan meminimalisir evaluasi dari pengalaman-pengalaman pemerintah selama membangun perdamaian di Poso. Dari sinilah SFCG mendapatkan

¹⁷ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

informasi-informasi penting dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang diwakilkan kemudian mulai menjalin hubungan dengan pemerintah daerah Sulawesi Tengah, terutama yang menyangkut keamanan SFCG di Poso seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan aparat kepolisian¹⁸.

Salah satu tantangan untuk bekerjasama dengan Menkopolkam diakui oleh Bapak Hardya Pranadipa bahwa lembaga pemerintahan seperti ini memiliki birokrasi yang ketat, sehingga segala agenda kegiatan harus benar-benar terjadwal dengan baik dan tidak boleh ada administrasi yang terlewatkan. Konsekuensinya apabila terdapat satu kekurangan, maka penjadwalan ulang dengan pihak-pihak terkait sangat memungkinkan dan akan memakan waktu lebih. Namun hambatan tersebut tidak pernah terjadi karena segala hal yang telah dibutuhkan telah dipersiapkan oleh sekretaris SGCG tahun 2004, Maryam Nainggolan.¹⁹

2. Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia

Bentuk kerja sama SFCG dengan Kemenag lahir setelah dilaksanakan lokakarya penguatan program SFCG di Poso yang dihadiri 23 tamu undangan termasuk perwakilan dari Dirjen Pemasarakatan, Kementerian Sosial, BNPT, Yayasan Prasasti Perdamaian, rekan media, dan Menkopolkam di Kantor Dirjen Pemasarakatan, Jakarta Pusat pada tanggal 5 Mei 2015 (Search for Common Ground, 2015, p. 14). Dari

¹⁸ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

¹⁹ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

kegiatan ini, salah satu kesimpulan mengenai program SFCG di Poso yang menyoal anak muda adalah SFCG akan menyusun modul pendidikan berbasis keagamaan yang akan disalurkan ke sekolah/madrasah terpilih untuk menjalankan program *Student Initiatives Program on Peacebuilding*.²⁰

Kerja sama dengan Kemenag dalam penyusunan modul pendidikan bermaksud agar materi keagamaan yang diberikan lebih mendalam dan lebih luas dari modul pendidikan yang disusun oleh Dinas Pendidikan. Hal ini karena seluruh pegawai di Kemenag memiliki ilmu pengetahuan keagamaan yang lebih luas, sehingga modul yang akan disusun lebih terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan.

“...Kemenag, karena sesuai usul dan masukan dari teman-teman. Nanti konten modul kita akan lebih berbobot dari yang disusun sama Dinas Pendidikan, lebih mendalam. Orang-orang di Kemenag kan sudah pasti ilmunya lebih tinggi kalau soal agama, jadi lebih mantap.”²¹

Dalam penyusunan modul, SFCG berkonsultasi dengan beberapa pegawai di bawah pimpinan Bapak Suwardi, M.Pd selaku Kasi Kurikulum dan Evaluasi mengenai materi yang akan dimuat beserta konten pendukung lainnya. Selibhnya untuk *editing* dan produksi ditangani langsung oleh SFCG melalui *Common Ground Productions*. Setelah *draft* selesai, SFCG menyerahkan sampel modul kepada Kemenag untuk dikoreksi lebih lanjut. Apabila sudah tidak ada revisi, maka modul siap

²⁰ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

²¹ Wawancara dengan SFCG, 16 Januari 2017.

didistribusikan untuk guru-guru agama dari lembaga pendidikan terpilih. Pendistribusian modul dilaksanakan oleh SFCG secara independen melalui pelatihan yang diagendakan.

Modul tersebut memiliki lima subbab pembahasan yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepemimpinan anak muda agar selalu waspada akan segala bentuk gerakan ekstrimis yang mengatasnamakan agama. Kelima subbab tersebut antara lain, Pendahuluan: Tujuan, Pendekatan/Metodologi, Target, Alur & Sistematika; Modul I: Pembukaan, Perkenalan dan Orientasi Pembelajaran yang di dalamnya memuat Memulai Pelatihan, Perkenalan, Pemetaan Harapan dan Kekhawatiran, Kontrak Belajar, Mengawali Hari, Mengakhiri Hari, dan Deklarasi Kepemimpinan; Modul II: Materi Modul Kepemimpinan yang memuat Kepemimpinan Ideal, Kepemimpinan yang Bijaksana, Pertanyaan Mendalam, Jendela Johari, dan Tantangan Anak Muda Menjadi Seorang Pemimpin; Modul III: Resolusi Konflik yang memuat Apa Itu Konflik?, Gaya Menghadapi Konflik, Posisi dan Kepentingan, Pembangunan Konsensus, Pemecahan Masalah dengan Kerjasama, dan Peran Bina Damai; Modul IV: Komunikasi Efektif yang berisi Membangun Komunikasi Efektif dan Strategi Penyampaian Komunikasi yang Efektif, dan Modul IV: Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan yang membahas

Kerangka Kerja dan Lampiran. Seluruh materi di dalam modul disampaikan oleh tenaga pengajar dalam satu semester.

Dalam laporan SFCG tahun 2015 tertera bahwa selama pelaksanaan kerja sama dengan Kemenag menemui beberapa kendala, yang terbesar adalah adanya pergantian kepemimpinan di Kemenag yang mengakibatkan permasalahan pada penandatanganan perjanjian (MoU) pada program *Student Initiatives on Peacebuilding*. Hal ini menyebabkan penundaan pelaksanaan kegiatan yang seharusnya dimulai pada tahun ajaran 2014/2015 di sekolah/madrasah menjadi tahun ajaran 2015/2016. Sampai akhir triwulan 2015, MoU tersebut masih belum ditandatangani meskipun sudah mendapat persetujuan dari tim pemantauan dan evaluasi kementerian. Selanjutnya, pemerintah menyarankan agar SFCG menunda pelaksanaannya sampai MoU ditandatangani setelah akhir bulan Ramadhan. Dengan demikian, program *Student Initiatives on Peacebuilding* yang semula dijadwalkan pada bulan Januari-Juli 2015, ditunda sampai tahun ajaran berikutnya. (Search for Common Ground, 2015, pp. 23-24)

2.3.2. Masyarakat: Perempuan, Lembaga Adat/Agama, Lembaga Pendidikan

2.3.2.1. Perempuan

Keberhasilan program-program SFCG dalam membangun kembali perdamaian khususnya pada perempuan dan anak-anak korban konflik

Poso tidak terlepas dari peran perempuan dan anak-anak itu sendiri. Salah satu bentuk kerja sama eksternal SFCG perempuan korban konflik adalah terlaksananya kongres perempuan pertama dan terbesar pasca konflik pada tahun 2014. Kongres perempuan yang juga diinisiasi oleh Mosintuwu Institut ini berlangsung pada tanggal 25-27 Maret 2014 di Dodoha Mosintuwu, Tentena.

Kongres yang berhasil menghadirkan beberapa pejabat pemerintah pusat seperti Komnas Perempuan yang diwakili oleh Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Andy Yentriyani dan Soraya Ramli ini diikuti oleh 450 peserta umum dari 70 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Poso. Para peserta adalah perempuan-perempuan korban konflik Poso yang berasal dari berbagai latar belakang adat, budaya, agama, bahkan profesi. (www.sejuk.org, 2014)

Berlangsungnya kongres perempuan akbar di Mosintuwu juga tidak terlepas dari dukungan penuh organisasi maupun komunitas serupa dibuktikan dengan kehadiran perwakilan-perwakilannya seperti dari Aliansi Perempuan Maringin Jambi oleh Tundung Hastuti, Sri Mulyati dari *Sapa Institute*, Budi Satrio dari Gerakan Membangun Desa, dan beberapa aktivis perempuan dari berbagai daerah seperti Norma Susanti dari Balai Syura Aceh, Baihajar Tualeka dari Maluku, dan Sutini dari Labuan Batu Selatan Sumatera Utara (www.sejuk.org, 2014). Kehadiran

mereka di tengah kongres turut berperan dalam memberikan informasi dan penguatan komitmen kepada perempuan-perempuan korban konflik Poso untuk mencapai cita-citanya sebagai agen perdamaian yang sering terlupakan.

Kongres Perempuan Mosintuwu ini membahas dua topik utama, yaitu Sejarah Perempuan di Indonesia dan Poso, dan Undang-Undang Desa. Kongres yang diselenggarakan selama dua hari tersebut menghasilkan 135 rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah serta masyarakat sipil dalam hal pemberdayaan perempuan. Bulir-bulir rekomendasi yang disampaikan sangat rinci dan jelas, diantaranya adalah 27 rekomendasi yang menyangkut hak perempuan atas layanan publik, 35 rekomendasi tentang perempuan dan anak, 23 rekomendasi tentang partisipasi politik perempuan, 19 rekomendasi tentang adat dan kebudayaan yang menyangkut perempuan, 12 rekomendasi tentang pembangunan ekonomi oleh perempuan, dan 10 rekomendasi yang ditujukan oleh Tim Perumus Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang (UU) Desa.

Perempuan Poso sengaja memberikan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan UU Desa karena merekalah yang pertama kali mendapatkan sosialisasi tentang UU Desa yang disahkan sejak Januari 2014. Kemudian semua hasil kongres dikirimkan kepada peserta kongres,

Pemerintah Pusat maupun Daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dijadikan pertimbangan dalam membuat kebijakan di masa depan (www.sejuk.org, 2014).

“Saya cerita ada kades perempuan, dia pakai dana desa untuk membuat sumur-sumur air bersih juga taman kanak-kanak. Saya tanya kenapa, ibu kades bilang *to* air bersih di Poso sedikit, sudah begitu kran-kran PDAM rusak akibat konflik, semua orang butuh air. Saya buat sumur biar orang kumpul disitu, omong-omong sampai rukun. Lalu saya tanya lagi kenapa taman kanak-kanak, jawab bu kades banyak anak harus sekolah. Orang tua masih banyak yang pengangguran, saya buat sekolah agar anak-anak kumpul *to* orang tuanya juga. Biar mereka berteman sampai rukun.”²²

Menurut keterangan Ibu Nurtahumil atas berlakunya UU Desa, perempuan Poso semakin menampakan diri dan kapasitas mereka yang sesungguhnya terutama dalam hal kepemimpinan. Bahkan menurut cerita Mama Nurtahumil di atas, seorang perempuan yang menjabat sebagai kepala desa menggunakan dana bantuan pemerintah untuk membangun Taman Kanak-Kanak (TK) dan sumber air di desanya. Alasannya, banyak anak-anak terutama usia balita yang berhak mendapatkan pendidikan dan kebahagiaan sejak kecil setelah dipandang sebagai anak yatim atas kehamilan di luar nikah. Dari TK inilah para anak-anak bertemu, bermain dan belajar. Sebagian besar orang tua terutama perempuan mengantarkan anak-anak ke sekolah dan menemaninya. Dari aktivitas inilah perempuan

²² Wawancara dengan Mbak Nur, 19 Januari 2017.

dapat saling bertemu, bertukar cerita, bahkan sama-sama saling memaafkan dan melupakan konflik masa lalu.

Sedangkan pembangunan sumber-sumber air di Poso bertujuan agar semua warga desa dapat bertemu dan berinteraksi satu sama lain. Tua, muda, Islam, Kristen, bahkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda sama-sama membutuhkan air, sedangkan persediaan air bersih sangat terbatas di Poso akibat konflik dan dampak kasus korupsi di Era Soeharto (Nordholt & Klinken, 2007). Maka dari itu, dibangunlah sumur sumber mata air agar warga desa saling bertemu dan berinteraksi sehingga mereka dapat melupakan masa lalu yang pernah merusak hubungan Islam dan Kristen Poso.

Selama menjalin kerja sama, SFCG menemukan adanya kendala kecil namun cukup menyulitkan seperti ketika hasil kongres yang harus disampaikan pada tiap peserta. Tidak semua dari peserta memiliki alamat *e-mail* karena rata-rata mereka hanya lulusan SMP dan SMA sehingga tidak begitu mengenal teknologi canggih. Hal ini menyebabkan penyebaran hasil kongres sedikit terganggu karena harus dilakukan secara manual dibantu Mosintuwu Institut untuk menunjuk satu perwakilan daerah peserta kongres untuk menyebarkan kembali kepada rekan-rekan satu daerahnya.²³

²³ Wawancara dengan Lian Gogali, 4 Oktober 2017.

2.3.2.2. Lembaga Adat/Keagamaan

Pada dasarnya kedudukan adat di Poso berada di bawah kedudukan agama, sehingga berbagai konflik yang terjadi di masyarakat diselesaikan secara keagamaan. Namun tidak berarti hukum adat di Poso tidak berlaku. Di beberapa daerah, adat masih sangat dijunjung tinggi sehingga menyebabkan munculnya Kampung Janda yang menganggap perempuan-perempuan korban konflik Poso yang hamil di luar nikah harus meninggalkan desanya karena dianggap sebagai aib dan membawa sial bagi masyarakat sekitar.

Disinilah peran tokoh agama seperti Ustad Ghani dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Poso, Ustad Ibrahim dari Pondok Pesantren Al-Khaahirat, Pendeta Thomas dan Pendeta Rinaldy Damanik serta tokoh agama lain sangat diperlukan agar dapat bertindak sebagai pemimpin yang bijaksana untuk menyingkirkan stigma tradisional yang masih melekat di masyarakat (Wahid Foundation, 2017). Beberapa stigma adat yang masih melekat pasca konflik adalah menyingkirkan perempuan yang hamil di luar nikah karena dianggap sebagai aib dan membawa sial di desanya, atau membayar denda kepada Dewan Adat Poso bagi keluarga yang anak perempuannya hamil di luar nikah padahal kondisi ekonomi pasca konflik masih menyulitkan bagi sebagian besar masyarakat Poso.

Oleh karena itu, SFCG turut menjalin kerja sama dengan lembaga adat/keagamaan Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) dan masyarakat

Muslim Poso untuk memproduksi video dokumenter dengan tujuan memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi perempuan dan anak-anak korban konflik dengan menghilangkan stigma masyarakat tersebut agar perempuan dan anak-anak korban konflik dapat diterima. Salah satunya melalui video dokumenter berjudul Masjid di Kampung Salib yang menceritakan kehidupan keluarga Ibu Bakri sebagai salah satu korban konflik Poso yang memilih untuk berjualan makanan di pemukiman Muslim.

Gambar 2.9
Video Dokumenter Masjid di Kampung Salib



Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=P8Kkb2eXni0>, Oktober 2017.

Dari cuplikan video di atas terlihat bahwa video dokumenter yang diproduksi pada tahun 2015 berdurasi 14 menit ini menggambarkan kehidupan Ibu Bakri dan suaminya yang beragama Kristen yang memilih tinggal di dekat Masjid Jami' Baitullah, satu-satunya masjid di tengah pemukiman Kristen di Tentena. Mereka membuka warung Coto Makasar

yang sudah berdiri selama lima tahun hingga dokumenter tersebut dibuat. Sebelumnya Ibu Bakri dan suaminya berprofesi sebagai penjual pakaian di Pasar Kelidung Poso, namun pasar tersebut hancur akibat konflik.

Dari warung coto ini, pelanggan yang datang tidak hanya dari kalangan Islam tapi juga Kristen. Sering kali dua kubu yang pernah berkonflik bertemu, makan bersama hingga menjalin hubungan persaudaraan yang baik. Kini tidak jarang apabila GKST memiliki acara seperti perayaan Natal turut mengundang masyarakat Islam, sebaliknya apabila masyarakat Islam memiliki pekerjaan bersama seperti memperbaiki masjid menjelang ramadhan maka masyarakat Kristen turut membantu.

Peran Ibu Bakri sangat penting di tengah masyarakat tersebut. Seringkali ia mempekerjakan perempuan korban konflik yang lain untuk membantunya di warung. Tidak jarang mereka adalah perempuan Muslim yang pernah hamil akibat konflik Poso dan diusir oleh keluarganya. Dari sinilah perempuan-perempuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan perlahan stigma masyarakat akan korban konflik yang harus diasingkan mulai hilang.

Menurut Ferdi Doranggi, sekretaris GKST menegaskan bahwa kehadiran keluarga Bakri di tengah-tengah perbedaan agama di Sulawesi Tengah sangat berpengaruh bagi pola pikir masyarakat sekitar, terutama pandangan Kristen terhadap Islam dan sebaliknya.

“Dalam konteks religius, kita harus selalu membawa slogan *Sintuwu Maroso* ke dalam aspek kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah yang artinya kebersamaan. Kita harus selalu bersama dalam suka dan duka. Perempuan-perempuan itu (korban konflik) juga duka kami juga. Kami harus tetap bersama. Dari kantin ini pintu kebersamaan kami dengan mereka. Mereka baik, tak harus disingkirkan. Kita dapat bekerjasama.” (SFCG, 2015)

Pernyataan dari GKST menunjukkan bahwa kini kehadiran para korban konflik Poso dapat lebih diterima dan tidak perlu diasingkan seperti hukum adat terdahulu yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial masyarakat Poso. Video dokumenter ini juga sering dipertontonkan di berbagai kesempatan seperti *workshop* atau kegiatan lain di Poso dan daerah Sulawesi Tengah yang lain untuk turut mengubah stigma masyarakat terutama yang masih berpegang teguh kepada kebudayaan lama untuk lebih toleransi kepada sesama.

Dalam perjalannya, tidak semua pemimpin agama/adat di Poso dan sekitarnya mau menerima pola pikir yang baru dengan mengutamakan HAM. Mereka menganggap bahwa budaya adalah warisan yang harus dilestarikan. Oleh sebab itu untuk mempermudah kerja sama dengan dewan adat/keagamaan tahap awal, sementara SFCG bekerjasama dengan pemimpin agama dari Poso kota (PCNU Poso dan GKST) seperti Pendeta Thomas dan Pendeta Rinaldy Damanik dari GKST, Ustad Ghani dari PCNU Poso, dan Ustad Ibrahim dari Pondok Pesantren Al-Khaahirat Poso. Tokoh-tokoh agama tersebut sudah lebih terbuka akan dampak-dampak konflik yang sangat

merugikan perempuan sehingga berupaya untuk membantu meringankan beban perempuan dan anak-anak korban konflik.

2.3.2.3. Lembaga Pendidikan

Dalam pendekatannya dengan masyarakat, SFCG tidak menggunakan *moral wisdom* untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugasnya. SFCG lebih menitikberatkan kepada nilai-nilai keagamaan terutama Islam dan Kristen Poso untuk membangun kembali perdamaian terlebih dengan adanya isu terorisme. Hal inilah yang mendorong kerja sama SFCG dengan Kemenag di beberapa sekolah dan universitas seperti SMA N 4 Palu, SMA Al-Khairaat, SMA N 1 Poso, SMA N Terpadu Madani, MA Al-Ikhlas, dan STAI Poso untuk melaksanakan mata pelajaran/kuliah tambahan yang berpedoman pada modul keagamaan.

Kerja sama dengan lembaga pendidikan ini berbentuk pelatihan yang difasilitasi penuh oleh SFCG selama 4 hari bagi tenaga pendidik di lembaga pendidikan terpilih di atas. Kegiatan yang mengusung judul Pelatihan Kolaborasi Lintas Agama ini dilaksanakan di Hotel Best Western Coco Palu dengan mengundang 12 guru agama dari enam lembaga pendidikan pada tanggal 18-21 Mei 2015. Pelatihan ini difasilitasi langsung oleh Bapak Suraji selaku *program officer* yang menangani isu-isu terorisme dari SFCG dibantu dengan Bapak Hardya Pranadipa dan Bapak Gusrowi yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan program resolusi konflik dan bina damai.

Secara garis besar, empat hari pelatihan digunakan untuk membahas kelima bab dari modul yang telah disusun yang juga sudah disebutkan oleh Penulis pada Kerja Sama Eksternal SFCG dengan Kemenag RI.

Dalam pelatihan tersebut SFCG tidak menemukan kendala yang berarti. Semua kegiatan berjalan sesuai agenda. Hal ini tidak terlepas dari penilaian SFCG terhadap para peserta dari kalangan tenaga pendidik yang dinilai sangat kooperatif dalam menjalani pelatihan bersama SFCG.

Dengan berbagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran SFCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak konflik Poso tahun 1998-2001 telah diwujudkan melalui lima program internal SFCG berupa produksi komik Perjalanan Mencari Sahabat, *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*, *Student Initiatives on Peace Building*, *Leading Fellowship Program*, dan *Festival Cipta Damai: Peace 360*. SFCG juga menjalankan program eksternal dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah Indonesia yang meliputi Menkopolkam RI dan Kemenag, dan berbagai lapisan masyarakat meliputi perempuan, lembaga pendidikan, dan lembaga adat/agama.